

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan yang menyajikan pelayanan publik berupa ide/gagasan teknologi yang memiliki nilai adaptasi dan dapat di modifikasi sesuai kebutuhan yang diperlukan, serta memiliki manfaat bagi pemerintah dan Masyarakat. Inovasi di perlukan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah menjadi kunci dalam mengakselerasi peningkatan daya saing penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, inovasi juga berkaitan dengan *e-government*.

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat administrasi lebih efektif dalam pengelolaan administrasi dan layanan publik dan untuk mencapai tujuan masyarakat mengenal teknologi menurut (Ferdika & Nasution 2020 dalam (Syamsuardi, 2022)). Inovasi juga berhubungan erat dengan *e-government* selaras dalam pelayanan birokrasi pemerintah tak terlepas dengan teknologi *e-government*, yang berperan aktif meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mempercepat terjadinya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan di era moderen saat ini perkembangan teknologi meningkat sangat cepat terutama dibidang sistem informasi di perusahaan, organisasi, dan Pemerintahan, tentu pasti akan mengembangkan peran teknologi informasi dalam bidang keamanan atau manajemen informasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi, perusahaan, Pemerintah dan sekolah untuk menerapkan sistem informasi yang

andal untuk mengatur kelancaran proses informasi, membantu dan mempercepat organisasi perangkat daerah dalam pekerjaan, dengan adanya *e-government*. Perumusan kebijakan merupakan langkah penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan memerlukan proses saat penerapannya bisa berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu teknologi yang berkembang adalah perkembangan teknologi telekomunikasi, internet, dan pendataan perkantoran yang berkembang sangat pesat.

Melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Perumusan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan administrasi elektronik memiliki tujuan antara lain, membangun sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien untuk memfasilitasi transaksi dan layanan antara lembaga Pemerintah dan negara. Kebijakan ini bersifat praktis dan isinya mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan *e-government* negara, berdasarkan perumusan kebijakan dan strategi nasional.

Penerapan peraturan *e-government* tersebut, dimasukkan kedalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan *grand design* reformasi birokrasi. artinya dalam strategi nasional Pemerintah melibatkan seluruh pihak-pihak terkait bisa mendorong terwujudnya *good government*, mengharuskan terjadinya akselerasi dan efisiensi dalam peningkatan performa kualitas Reformasi birokrasi, dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah tersebut menjelaskan, bahwa tujuan dari inovasi daerah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan kota, inovasi daerah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu tujuan *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ada beberapa bentuk pelayanan publik sebagai berikut meliputi:

- a. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik mudah diakses kapanpun dimanapun.
- b. Semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik
- c. Hubungan pemerintah kepada dunia usaha masyarakat dan birokrasi secara interaktif dan selalu di update.
- d. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik
- e. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
- f. Pengembangan sistem kinerja pegawai yang memiliki orientasi perbaikan kualitas sumberdaya manusia, diperlukan sebagai proses penjunjang mutasi, rotasi, demosi dan promosi, seluruh karyawan pemerintah.

Dalam hal ini pelaksanaan *e-governmen* di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaanya dilihat dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau 2020, terdapat beberapa isu terkait layanan *e-government* strategis yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut: (1) Pengembangan aplikasi pemerintahan dan publik belum optimal. (2) Pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik belum optimal (3) Pengelolaan domain, dan sub domain Pemerintah Provinsi Kepri belum optimal.

(4) *Statistiksektoral* belum optimal. (5) Data statistik sudah terkompilasi tapi belum akurat.

Menurut Heriawanto dalam (Illif Rizki Andreyani Syihab et al., 2022) daftar hadir atau presensi manual hanya berupa buku absensi menjadi kendala bagi instansi Pemerintah untuk memantau disiplin pegawai, kedatangan dan keberangkatan karyawan tepat waktu setiap hari. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi komitmen karyawan dalam bekerja, menurunnya *employee engagement* berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilihat dari segi inovasi pemanfaatan teknologi absensi pegawai Dinas Kominfo Kepri, dari absensi menggunakan *finggerprint* hingga beralih menggunakan aplikasi SIAP KEPRI.

Pada sistem presensi manual absensi berbasis seperti *finggerprint* Dinas Kominfo Kepri kurang efektif pada saat pembuatan satu mesin *finggerprint* seharga 4jt dengan *hardware solution* X601 yang memiliki kelemahan pada saat mengantri absen apel pagi, serta pada saat pandemi covid-19 dan sensor *fingerprint* seringkali *eror* menimbulkan biaya perawatan cenderung lebih mahal Hal ini berdampak pada kurang efisiensi dan efektifitas, saat pengumpulan data, pencarian data dan proses perhitungan rekap kehadiran kurang efektif sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. dibandingkan menggunakan absen berbasis aplikasi SIAP KEPRI memiliki anggaran pembuatan 0,Rp di karenakan menggunakan *software firebase* dari *google maps* yang hanya mengcoling dari sistem yang sudah ada di kota maju seperti di Bandung dalam hal perawatan akan cenderung lebih murah. Pegawai dapat membuktikan kehadiran hanya

menggunakan absen *online* mempermudah kegiatan saat masuk kerja absen berbasis aplikasi sudah digunakan oleh kota besar dan maju untuk integrasi data serta mempermudah aksesibilitas birokrasi di sebuah instansi perkantoran.

Absensi pegawai terdapat faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi Pemerintahan yakni, ketepatan waktu dan kejujuran pegawai dinilai memberikan kontribusi bagi perkembangan lembaga/institusi. Sistem absensi karyawan sering digunakan untuk memastikan bahwa karyawan terlibat dan bertanggung jawab atas kinerja untuk mencapai hasil yang maksimal dan sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan (Subiantoro & Sardiarinto, 2018).

Sistem absensi yang digunakan Dinas Kominfo Kepri saat ini adalah aplikasi SIAP KEPRI untuk pengelolaan absensi pegawai Dinas Kominfo Provinsi Kepri, pada waktu beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2019 absensi menggunakan *fingerprint* memiliki permasalahan seperti titip absen melalui silicon sidik jari pada saat absen masuk dan pulang, kemudian pada saat absen apel hari senin banyak pegawai mengantri hingga memakan waktu kurang lebih satu jam saat absen pegawai, namun saat hadirnya aplikasi absensi SIAP KEPRI sangat memudahkan pegawai absen dimana saja selama berada di wilayah aktivasi absen tersebut. Dari kelemahan absen *fingerprint* tersebut aplikasi SIAP KEPRI memiliki kelemahan seiring perkembangan zaman tentu hal tersebut dapat mempersulit admin super dalam pengawasan manipulasi absensi menggunakan *fake GPS* adapun gambar yang bisa dilihat sebagai luas wilayah aktivasi kantor Dinas yang menggunakan aplikasi SIAP KEPRI sebagai tambahan peneliti memasukan luas lokasi aktivasi saat absen, dengan luas lokasi tersebut, pegawai

dengan mudah bisa memanipulasi dengan aplikasi tambahan yang dapat di unduh melalui *google play store* sesuai dengan kemajuan teknologi juga memudahkan siapapun mendapatkan apapun. Adapun solusi dari inovasi yang di buat Dinas Kominfo Kepri terkait kecurangan tersebut yakni *update blacklist app* yang bisa mendeteksi kecurangan dari akun yang menggunakan aplikasi *fake GPS*. Adapun data absensi yang bisa di dapatkan pada pengguna SIAP KEPRI dan *blacklist app* sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Log Presensi SIAP KEPRI dari 43 OPD 2020-2023

Data LogPresensi SIAP KEPRI					
No	Bulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Juni	56	90.224	103.678	110.254
2.	Juli	84	91.467	104.554	110.354
3.	Agustus	1.114	105.113	104.687	110.467
4.	September	66.888	169.886	102.686	110.595
5.	Oktober	63.633	110.876	104.853	111.569
6.	November	85.753	113.961	104.944	112.578
7.	Desember	85.800	119.058	105.459	112.942

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Data Base SIAP KEPRI, 2023.

Tabel 1.2 Data Absensi 10 Pegawai Juli 2020

Data Akun Presensi SIAP KEPRI			
No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	2020-07-14	11:56:40	-
2.	2020-07-09	09:58:58	-
3.	2020-07-13	09:53:50	-
4.	2020-07-07	07:56:34	-
5.	2020-07-27	07:17:08	16:00:53
6.	2020-07-27	07:42:50	-
7.	2020-07-13	07:46:52	-
8.	2020-07-13	07:53:05	-
9.	2020-07-27	07:58:50	-
10.	2020-07-01	10:33:30	-

Sumber: Data Base Log Presensi SIAP KEPRI, 2023.

Tabel 1.3 Data Absensi 10 Pegawai Desember 2020

Data Akun Presensi SIAP KEPRI			
No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	2020-12-04	07:45:37	15:04:00
2.	2020-12-07	07:31:47	-
3.	2020-12-08	07:36:15	-
4.	2020-12-10	07:39:04	16:08:56
5.	2020-12-11	07:09:06	15:11:41
6.	2020-12-14	07:27:26	16:07:00
7.	2020-12-15	07:54:24	16:04:18
8.	2020-12-16	07:48:16	16:04:36
9.	2020-12-17	07:32:03	-
10.	2020-12-21	07:35:41	16:02:59

Sumber: Data Base Log Presensi SIAP KEPRI, 2023.

Tabel 1.4 Data Absensi 10 Pegawai Desember 2021

Data Akun Presensi SIAP KEPRI			
No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	2021-12-02	07:56:41	-
2.	2021-12-13	07:47:27	-
3.	2021-12-01	07:45:11	16:10:54
4.	2021-12-02	07:47:42	17:14:11
5.	2021-12-06	07:35:45	16:06:31
6.	2021-12-07	07:42:12	16:22:21
7.	2021-12-08	07:40:28	16:26:24
8.	2021-12-09	07:51:41	16:03:46
9.	2021-12-10	07:42:00	15:18:45
10.	2021-12-13	07:41:27	16:02:12

Sumber: Data Base Log Presensi SIAP KEPRI, 2023.

Tabel 1.5 Data Absensi 10 Pegawai Desember 2022

Data Akun Presensi SIAP KEPRI			
No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	2022-12-05	07:37:29	16:12:41
2.	2022-12-06	07:45:33	16:25:50
3.	2022-12-07	08:03:27	16:35:16
4.	2022-12-12	07:52:25	16:18:30
5.	2022-12-13	07:47:50	16:08:57
6.	2022-12-14	07:49:18	16:21:50
7.	2022-12-15	07:46:00	16:07:43
8.	2022-12-16	07:49:59	16:03:36
9.	2022-12-19	07:44:59	15:03:53
10.	2022-12-26	07:52:46	16:01:40

Sumber: Data Base Log Presensi SIAP KEPRI, 2023.

Tabel 1.6 Data Absensi 10 Pegawai Desember 2023

Data Akun Presensi SIAP KEPRI			
No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	2023-12-04	07:28:17	16:07:19
2.	2023-12-11	07:30:34	16:08:35
3.	2023-12-12	07:29:34	16:11:42
4.	2023-12-13	07:30:34	16:04:45
5.	2023-12-18	07:30:21	16:04:14
6.	2023-12-20	07:24:36	-
7.	2023-12-27	07:27:07	16:18:11
8.	2023-12-28	07:41:34	16:07:31
9.	2023-12-29	-	16:31:17
10.	2023-12-11	07:14:56	16:03:34

Sumber: Data Base Log Presensi SIAP KEPRI, 2023.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 4 tahun 2019 tentang penerapan disiplin kerja pasal 5 Ayat 2 huruf a,b,c menyebutkan jam kerja efektif 37,5 jam dalam 5 hari kerja dimulai dari hari senin sampai kamis 08.00-16.00 WIB dihari juma'at 08.00-15.00 WIB dan istirahat hari juma'at 11.30 WIB – 13.00 WIB. Adapun contoh penerapan jam masuk kerja dan pulang kerja aplikasi SIAP KEPRI bisa di lihat pada table diatas.

Dari data 5 tabel diatas peneliti mengambil sampel 10 pegawai yang absensi masuk dan pulang, mengambil data dari mulai bulan awal pembuatan aplikasi SIAP KEPRI di Juli dan akhir tahun dibulan Desember dari tahun 2020-2023 pada Dinas Kominfo Kepri.

- a. pada tabel diatas terlihat pada bulan Juli masih minimnya pegawai yang absensi pulang, hanya 1 pegawai yang absen pulang dan ada 4 pegawai yang izin terlambat saat absen masuk pada table pertama.
- b. Dan pada table kedua terdapat peningkatan pada jam masuk semua pegawai pergi sebelum jam 8 pagi dan terdapat 3 pegawai yang tidak melakukan absensi dan terdapat 2 orang yang izin pulang cepat.

- c. Pada table ketiga terdapat pegawai yang masuk kerja sesuai peraturan diatas dan terdapat 2 orang yang tidak absen dan satu orang izin pulang cepat.
- d. Pada table keempat terdapat peningkatan disiplin pegawai di lihat dari ketepatan waktu pada absen sesuai peraturan yang ada
- e. Pada table kelima terdapat satu orang yang tidak absen masuk namun absen pulang dan terdapat pegawai yang absen masuk namun tidak absen pulang.

Semua organisasi Pemerintah harus memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan sebuah sistem presensi yang bisa di awasi secara langsung seperti SIAP KEPRI. Menurut (Anggoro, 2017) Reformasi birokrasi memerlukan proses yang panjang dan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat karena memerlukan perubahan pola pikir dan budaya seluruh pimpinan Pemerintahan, komitmen pimpinan dan kesadaran yang tinggi untuk menata ulang birokrasi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dari sini peneliti mengamati seperti inovasi yang baru akan melahirkan budaya yang baru yang akan menimbulkan masalah baru di sektor reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan membantu meningkatkan tanggung jawab dan loyalitas pegawai dan pemanfaatan teknologi bagi pegawai.

Dari observasi awal dengan pengguna aplikasi SIAP KEPRI, inovasi SIAP KEPRI terdapat celah bagi pegawai untuk melakukan kecurangan seperti penggunaan *fake GPS*, *emulator*, *root*, *vemos*, sehingga pegawai dapat melakukan

absen di luar lokasi aktivasi absen di Dinas Kominfo Provinsi Kepri. sehingga *monitoring preventif* dari inovasi aplikasi SIAP KEPRI menjadi hal penting yang harus di miliki Dinas Kominfo Kepulauan Riau sebagai pengembang aplikasi dalam layanan *e-government* mendukung reformasi teknologi birokrasi pegawai.

Tabel 1.7 Data Blacklist APP SIAP KEPRI dari 43 OPD 2020-2023

Akun Data Pengguna Blacklist App SIAP KEPRI					
No	Bulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Januari	-	-	1.295	130
2.	Febuary	-	-	-	548
3.	Maret	-	-	-	152
4.	April	-	-	-	76
5.	Mei	-	-	-	55
6.	Juni	-	-	-	31
7.	Juli	-	-	-	43
8.	Agustus	-	-	-	59
9.	September	-	-	-	74
10.	Oktober	-	-	518	51
11.	November	-	-	822	183
12.	Desember	-	-	128	89
Total				2.763	1.491

Sumber: Data Base SIAP KEPRI, 2023.

Fitur *Blacklist app* memberikan data mengenai pegawai yang melakukan kecurangan diseluruh OPD dengan cara menggunakan aplikasi *Fake GPS* dapat di lihat pada table diatas di mulai dari tahun 2022 terdapat 1.295 pegawai di bulan Januari, Oktober 518 pegawai, November 822 pegawai, Desember 128 pegawai total 2.763 pegawai. Kemudian tahun 2023 total dari keseluruhan pengguna *fake GPS* berjumlah 1.491 pegawai ada penurunan kecurangan yang di lakukan pegawai sebesar 46% dari tahun 2022 sampai 2023.

Adapun tugas Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Kopri melalui bidang penilaian kinerja disiplin dan penghargaan pegawai, dari peraturan pendisiplinan pegawai terkait penggunaan

aplikasi SIAP KEPRI, penelitian ini memiliki fokus lokasi peneliti antara lain di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan aplikasi SIAP KEPRI dengan adanya data di bawah ini, fitur *blacklist app* memberikan monitoring bagi evaluasi Dinas Kominfo Kepri dalam pendisiplinan pegawai sebagai berikut :

No	Nama	No HP	Alamat	Jenis	Status	Aksi
1	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
2	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
3	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
4	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
5	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
6	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
7	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
8	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
9	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
10	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
11	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]
12	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Hapus]

Sumber: Data Base Dinas Kominfo Kepri, 2023.
Gambar 1.1 Data 12 Pegawai Pengguna Blacklist

#	TANGGAL PENGGUNAAN
1	2023-07-13 23:51:06
2	2023-07-13 23:50:58
3	2023-07-13 23:50:21
4	2023-07-13 23:50:11
5	2023-07-13 23:49:44
6	2023-07-13 23:49:38

Sumber: Data Base Dinas Kominfo Kepri, 2023.
Gambar 1.2 Data 6 Pegawai Blacklist

Dari data diatas terdapat pegawai Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan aplikasi tambahan untuk manipulasi absensi terdapat 12 orang yang diberi peringatan 6 orang yang dikunci akunnya pada tanggal 07 Juli 2023 dan pada data absensi bulan 13 Juli terdapat 6 orang yang tidak di anggap tanpa keterangan dikerenakan pada sistem SIAP KEPRI langsung otomatis terdeteksi menggunakan aplikasi tambahan dan langsung di proses oleh super admin agar menindak lanjuti prosedur sesuai peraturan gubernur no 4 tahun 2019 tentang manipulasi data absensi pegawai. Adapun jumlah Pegawai Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 2023 , berjumlah 157 pegawai terdiri dari 41 pegawai PNS, 42 pegawai PTT, THL 74 pegawai tenaga ahli sebanyak 8 pegawai.

Dari fenomena diatas peneliti tertarik meneliti “Penerapan Inovasi SIAP KEPRI di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau” karena mengacu pada Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 belum terintegerasi dengan baik, dengan ditemukan penggunaan *fake GPS* sebagai cara memanipulsi sistem absensi pegawai. Adapun Badan Kepegawaian Daerah dan Kopri sebagai instasi yang mengatur regulasi penerapan inovasi SIAP KEPRI dibidang pendisiplinan pegawai dari segi pemberian penghargaan dan hukuman bagi pegawai dalam penggunaan aplikasi SIAP KEPRI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas berujung pada rumusan masalah yaitu, “Bagaimana Penerapan Inovasi Sistem Informasi Aktivasi Presensi SIAP KEPRI di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan dalam penulisannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui “Penerapan Inovasi Sistem Informasi Aktivasi Presensi SIAP KEPRI studi kasus Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau” dalam mendukung peningkatan kualitas reformasi teknologi birokrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan manfaat secara praktis adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan penulis khususnya, pelajar dan masyarakat serta pemahaman peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan inovasi dan perkembangan reformasi birokrasi di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan inovasi pemanfaatan dan pengembangan reformasi birokrasi berbasis presensi pegawai.
- b. Manfaat yang di dapat oleh pihak Pemerintah khususnya pengembang Dinas Kominfo, hasil penelitian ini diharapkan sebagai saran dalam memperbaiki aplikasi SIAP KEPRI agar

pegawai lebih disiplin absen dan meminimalisir celah kecurangan pegawai, saran ini bertujuan mendukung Reformasi Birokrasi Presensi Pegawai didalam pengguna aplikasi SIAP KEPRI agar meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai.

